

KEBIJAKAN MITIGASI KONFLIK GAJAH LIAR DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT

Safriani Rahmayanti¹, Irwandi², Karuni Humaira Arta³, Arfriani Maifizar⁴,
dan Afrizal Tjoetra⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Teuku Umar

¹safrianirahmayanti@utu.ac.id, ²irwandi@utu.ac.id,
³khairunihumaira@gmail.com, ⁴afrianimafizar@utu.ac.id,
⁵afrizaltjoetra@utu.ac.id

ABSTRAK

Konflik antara gajah liar dan masyarakat di Aceh Barat merupakan salah satu permasalahan sosial-ekologis yang kompleks. Konflik ini dipicu oleh penyempitan habitat gajah akibat alih fungsi lahan, perambahan hutan, dan tidak adanya zona penyangga yang memadai antara kawasan hutan dengan permukiman. Pergerakan kawanan gajah terutama terjadi di Krueng Meulaboh, Lawet, Canggai, dan Lango. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan mitigasi konflik yang diterapkan pemerintah dan aktor lokal serta mengevaluasi efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa strategi mitigasi seperti penggiringan gajah, pembangunan pagar listrik, dan pembentukan Conservation Response Unit (CRU) telah dilakukan, tantangan berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan strategi integratif berbasis kolaborasi multipihak dengan menguatkan regulasi lokal, mempercepat implementasi Rencana Induk Koridor Gajah Sumatera, memperkuat kapasitas pawang gajah (mahout), serta mengembangkan konsep Managed Elephant Range. Dengan demikian, mitigasi konflik dapat berjalan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang.

Kata kunci: Konflik, Mitigasi, Kebijakan, Konservasi, Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Konflik antara manusia dan gajah liar telah menjadi isu menonjol di berbagai wilayah Sumatra, termasuk Kabupaten Aceh Barat. Fenomena ini semakin meningkat seiring

penyempitan ruang jelajah gajah akibat ekspansi perkebunan masyarakat, alih fungsi hutan, serta pembangunan infrastruktur yang mengurangi daya dukung habitat (Global Forest Watch, 2021; Yoza et al., 2023). Secara ekologis, gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) membutuhkan ruang jelajah luas. Perubahan lanskap memaksa gajah keluar dari habitat alaminya dan memasuki area pertanian masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan ancaman keselamatan (WRI Indonesia, 2023; Ferdian et al., 2023).

Menurut teori konflik Karl Marx, pertentangan ini mencerminkan perebutan sumber daya antara kebutuhan ekonomi manusia dan kebutuhan ekologis gajah. Sementara itu, Dahrendorf menegaskan bahwa ketidakseimbangan otoritas dalam pengambilan keputusan tata kelola hutan memperpanjang eskalasi konflik (Dahrendorf, 1959). Data BKSDA Aceh menunjukkan intensitas konflik tinggi di Krueng Meulaboh, Lawet, Canggai, dan Lango dengan tren lebih dari 120 kasus pada 2022–2024 (BKSDA, 2024).

Penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek ekologi (Sukumar, 2003; Nyhus, 2016), sedangkan dimensi sosial-politik konflik sering terabaikan. Kekhasan penelitian ini adalah menggunakan perspektif sosiologi konflik untuk menganalisis kebijakan mitigasi di tingkat lokal. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan strategi mitigasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan satwa, tetapi juga pada keadilan sosial masyarakat. Tanpa intervensi partisipatif, konflik akan berulang dan mengancam konservasi jangka panjang (Febryanoet al., 2024). Konflik antara manusia dan gajah liar di Kabupaten Aceh Barat telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Fenomena ini muncul akibat menyempitnya habitat gajah karena deforestasi, alih fungsi lahan menjadi perkebunan, serta meningkatnya aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan. Menurut data BKSDA Aceh (2024), terdapat lebih dari 40 kasus konflik manusia-gajah yang tercatat di wilayah Lawet, Lango, dan Krueng Meulaboh. Dampak konflik tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga populasi gajah yang semakin menurun.

Secara teoritis, penelitian ini merujuk pada teori konflik sosial Karl Marx yang menyoroti perebutan sumber daya antara manusia dan alam. Selain itu, teori Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik juga muncul karena ketimpangan otoritas dan akses dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan. Dalam konteks Aceh Barat, ketimpangan ini tampak pada minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam penyusunan kebijakan konservasi.

Kekhasan penelitian ini terletak pada pendekatan sosial-ekologis yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme mitigasi, bukan hanya sebagai korban. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan sekaligus

mengembangkan strategi mitigasi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekologis setempat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana efektivitas kebijakan mitigasi konflik gajah liar di Kabupaten Aceh Barat; dan (2) bagaimana strategi penguatan kebijakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan dapat diimplementasikan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis (Creswell, 2016). Lokasi penelitian di Krueng Meulaboh, Lawet, Canggai, dan Lango, Januari–April 2025. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara semi-struktural dengan pejabat BKSDA, tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, dan pawang gajah, serta observasi partisipatif (Ferdian et al., 2023).

Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, eksplorasi data primer, reduksi data dengan koding tematik, analisis interpretatif berbasis teori konflik, dan penyajian hasil dalam narasi analisis (Miles & Huberman, 1994). Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber (Creswell, 2016).

C. ANALISIS DATA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi yang diterapkan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Program pembangunan pagar listrik dan patroli satwaoleh CRU dan WRU berhasil menekan beberapa kasus konflik, tetapi tidak berkelanjutan karena keterbatasan biaya perawatan dan kurangnya partisipasi warga. Peran mahout (pawang gajah) terbukti sangat penting dalam mengarahkan gajah ke jalur aman, namun jumlah mahout yang aktif masih terbatas.

Tabel 1. Data Intensitas Konflik Gajah dan Masyarakat di Gampong Terdampak (Tahun 2022–2024)

| GAMPONG | JUMLAH KONFLIK | | |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Krueng Meulaboh | 12 | 15 | 14 |
| Lawet | 9 | 11 | 10 |
| Canggai | 7 | 8 | 9 |
| Lango | 10 | 12 | 11 |
| TOTAL | 38 | 46 | 44 |

Sumber: BKSDA Aceh Barat, 2024.

Dari perspektif sosiologi konflik (Marx, 1867; Dahrendorf, 1959) menjelaskan konflik sebagai perebutan ruang dan distribusi otoritas timpang. Masyarakat sering tidak dilibatkan dalam tata kelola hutan, sehingga kebijakan bersifat top-down dan menimbulkan resistensi. Studi terbaru menegaskan persepsi masyarakat positif dapat meningkat bila ada keterlibatan dalam CRU (Ferdian et al., 2023; Susilo et al., 2024).

Strategi penguatan mitigasi perlu diarahkan pada: (1) pengelolaan habitat terpadu atau Managed Elephant Range (Febryano et al., 2024); (2) restorasi hutan dan rehabilitasi koridor gajah (Oelrichs et al., 2016); (3) penguatan kapasitas pawang gajah; (4) edukasi masyarakat berbasis kearifan lokal (Suryadi, 2021); dan (5) penggunaan teknologi sensor seismik & IoT untuk deteksi dini (Wijayaraja et al., 2024; Bandara & Bandara, 2023).

D. KESIMPULAN

Konflik manusia dan gajah di Aceh Barat menunjukkan adanya ketimpangan tata kelola ruang dan lemahnya implementasi kebijakan mitigasi berbasis partisipasi masyarakat. Diperlukan strategi integratif yang memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kapasitas masyarakat dan mahout, serta mempercepat penerapan konsep pengelolaan habitat terpadu. Kebijakan mitigasi yang berorientasi pada kolaborasi multipihak serta pemanfaatan teknologi untuk mitigasi berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di wilayah Aceh Barat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Tim CRU dan WRU, masyarakat Gampong Krueng Meulaboh, Canggai, Langodan Lawet, serta Universitas Teuku Umar yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

F. REFERENSI

- Bandara, N. S., & Bandara, D. P. (2023). Elemantra: An End-to-End Automated Framework Empowered with AI and IoT for Tackling Human-Elephant Conflict. arXiv.
- Barua, M., Bhagwat, S. A., & Jadhav, S. (2013). The hidden dimensions of human-wildlife conflict. *Biological Conservation*, 157, 309–316.
- BBC Indonesia. (2023). Konflik manusia dan gajah di Jambi.

- BKSDA Aceh. (2024). Laporan tahunan konflik gajah di Aceh Barat.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design*. Sage.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford.
- Defri Yoza, R., Saputra, R., & Pebriandi, P. (2023). Human-Elephant Conflict in Bengkalis Regency. *E3S Web of Conferences*.
- Ferdian, N. R., et al. (2023). People's perceptions of human-elephant conflict in Aceh Jaya. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(3).
- Febryano, I. G., et al. (2024). Mitigation efforts for human-elephant conflict in Bukit Barisan Selatan NP. *Jurnal Belantara*, 7(2), 218–231.
- Fernando, P., et al. (2012). Human–elephant conflict in Asia. *Gajah*, 37, 25–34.
- Global Forest Watch. (2021). *Laporan Kehilangan Hutan Sumatera*.
- Graham, M. D., et al. (2010). Crop-raiding by elephants in Kenya. *Systematics and Biodiversity*, 8(4), 435–445.
- Gunaryadi, D., & Sugiyo. (2017). Mitigasi konflik manusia–gajah menggunakan pagar listrik di Sumatra. *JPHKA*, 14(1), 23–34.
- Kompas.com. (2022, 2 Januari). Laporan BKSDA tentang habitat gajah.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital*. Dietz Verlag.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage.
- Mongabay. (2024). As human-elephant conflicts in Sumatra rise, risk from electric fences increases.
- Mutmainah. (2010). *Panduan Penulisan Ilmiah*. Gadjah Mada Press.
- Nyhus, P. J. (2016). Human–wildlife conflict and coexistence. *Annual Review Env. Resources*, 41, 143–171.
- Oelrichs, J., et al. (2016). Deforestation in Sumatra. *Biological Conservation*, 194, 173–180.
- Sukmantoro, W., & Waluyo, T. (2020). Konflik manusia dan gajah di Sumatera. *Jurnal Biologi Tropis*, 20(2), 85–94.
- Sukumar, R. (2003). *The Living Elephants*. Oxford University Press.
- Susilo, Y. D., et al. (2024). Community perceptions of human–elephant conflict on agricultural land. *Annals of Agri Bio Research*, 29(2).
- Suryadi, F. (2021). Peran partisipasi masyarakat dalam konservasi satwa liar di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekologi*, 9(1), 12–24.
- Wijayaraja, J. L., et al. (2024). Long-range detection of elephants using seismic signals. *arXiv*.

WRI Indonesia. (2023). Konflik manusia dan gajah.

WWF Indonesia. (2019). Laporan tahunan konservasi gajah Sumatera.

Yayasan Leuser International. (2021). Webinar: Akar Konflik Manusia-Gajah di Aceh.

Zimmermann, A., et al. (2009). Community-based HEC management in Assam. *Oryx*, 43(1), 66–74.